

BAB II

HUBUNGAN KERJASAMA EKONOMI TIONGKOK-ZAMBIA

Setelah memahami latar belakang masalah dan kerangka konsep yang dijabarkan penulis. Pada bab ini akan menjadi salah satu bagian penulisan penelitian dikarenakan bab ini akan menjabarkan bagaimana hubungan kerjasama antara Tiongkok-Zambia, bagaimana kondisi Zambia sebelum masuknya investasi dan kerjasama dari Tiongkok, serta permasalahan apa saja yang dihadapi kedua negara, dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di Zambia serta penjelasan mengenai investasi Tiongkok di Afrika dan apa tujuan sebenarnya dibalik kerjasama dan investasi tersebut. Diharapkan penjelasan pada bab ini akan menjadi gambaran umum dan penyambung bagi bab selanjutnya.

2.1. Profil Negara Zambia

Republik Zambia adalah negara yang terletak di Afrika bagian selatan dengan luas wilayah sekitar 752.618 km² dan populasi sekitar 18 juta jiwa (perkiraan 2023). Ibukota negara ini adalah Lusaka, dan bahasa resmi yang digunakan adalah Bahasa Inggris, meskipun terdapat banyak bahasa lokal seperti Bemba, Nyanja, Tonga, dan Lozi yang juga banyak digunakan oleh masyarakatnya. Mata uang Zambia adalah Kwacha Zambia (ZMW), dan negara ini menjalankan sistem pemerintahan republik presidensial, dengan presiden saat ini Hakainde Hichilema yang menjabat sejak Agustus 2021 (Kemlu, 2018).

Zambia meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada 24 Oktober 1964. Secara geografis, Zambia berbatasan dengan delapan negara: Angola di barat, Republik Demokratik Kongo di utara, Tanzania di timur laut, Malawi di timur, Mozambik di tenggara, Zimbabwe dan Botswana di selatan, serta Namibia di barat daya. Negara ini terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, terutama tembaga, menjadikan Zambia salah satu produsen tembaga terbesar di dunia. Selain tembaga, Zambia juga memiliki cadangan besar kobalt dan sumber daya air yang signifikan dari sungai-sungai besar seperti Sungai Zambezi yang mendukung irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (AAREG, 2022)

Ekonomi Zambia sangat bergantung pada sektor pertambangan, khususnya tembaga, serta pertanian, pariwisata, dan manufaktur. Produk ekspor utama negara ini meliputi tembaga, kobalt, listrik, tembakau, bunga potong, dan kapas. Mitra dagang utama Zambia adalah Cina, Swiss, Republik Demokratik Kongo, Afrika Selatan, Uni Eropa, dan Uni Emirat Arab. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, Zambia menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Sistem pendidikan dan layanan kesehatan di negara ini masih membutuhkan banyak perbaikan. Tingginya angka penyakit menular seperti HIV/AIDS dan malaria menjadi salah satu tantangan utama di sektor kesehatan, sementara akses ke pendidikan berkualitas juga masih terbatas di beberapa daerah (World Bank, 2015)

Secara politik, Zambia memiliki sejarah stabil dengan beberapa pergantian kepemimpinan melalui proses pemilu yang relatif damai.

Hubungan internasionalnya sangat berfokus pada kerjasama regional di Afrika serta kemitraan ekonomi dengan negara-negara besar seperti Cina dan negara-negara Barat. Namun, negara ini juga menghadapi tantangan ekonomi yang serius, termasuk hutang luar negeri yang tinggi dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan upaya untuk meningkatkan infrastruktur, Zambia memiliki prospek untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Negara ini sedang berjuang untuk mengatasi tantangan pembangunan sambil memanfaatkan kekayaannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya (Roberts, 2023)

Sebelum adanya proyek Tiongkok masuk ke Zambia. Zambia masih menjadi negara yang sama dengan negara Afrika lainnya yaitu menginginkan kemerdekaan. Tentunya kemerdekaan Zambia tidak terlepas dari campur tangan negara lain. Tiongkok menjadi negara yang membantu Zambia dalam memperjuangkan kemerdekaan Zambia. Fokus pada kebijakan luar negeri Zambia pada masa itu berfokus pada pembebasan di Afrika dibagian selatan atau reformasi ekonomi. Selanjutnya pengaruh masyarakat Zambia terhadap perumusan kebijakan-kebijakan pascakolonialisme masih belum jelas dan dampak kebijakan dari partai *United National Independence Party* (UNIP) terhadap warga negara dinilai memiliki dampak buruk terhadap keterlibatan pemerintahan dalam perjuangan kemerdekaan di Afrika terhadap masyarakat. Saat menilai di

parlemen pada awal tahun 1980 betapa besarnya biaya yang harus dibayar rakyat Zambia atas dukungan pemerintahnya terhadap perang pembebasan di sekitar Zimbabwe (Walima, 2014).

Sebelum masuknya kerjasama dan investasi dari Tiongkok, Zambia mengalami beberapa kondisi yang mempengaruhi kemajuan ekonominya. Dimulai dengan *Zambianization*. *Zambianization* adalah istilah yang merujuk kepada kebijakan nasional Zambia yang dilaksanakan pada tahun 1968. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol dan kepemilikan ekonomi oleh warga negara Zambia sendiri, yang pada saat itu baru saja merdeka dari kekuasaan kolonial Inggris. *Zambianization* berfokus pada penggantian pekerja asing dengan tenaga kerja lokal serta peningkatan kepemilikan bisnis dan industri oleh warga Zambia.

Zambia mulai menjalin kerjasama dengan beberapa negara lain, membuka jalur perdagangan, dan menerima investasi asing yang masuk ke Zambia. *Zambianization* yang dimulai sejak tahun 1960-an telah membuka peluang bagi para investor asing untuk menanamkan modal di Zambia. Penguasaan pertambangan secara penuh oleh negara telah mempersiapkan Zambia untuk menerima berbagai keuntungan dan dampak dari aktivitas penanaman modal.

Pada awalnya, sebelum adanya kerjasama dan investasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Zambia, Tiongkok membantu Zambia

karena kepentingan politik Tiongkok yang mana Tiongkok menganggap dirinya sebagai sekutu melalui kerjasama bantuan selatan-selatan. Dalam teori pembangunan internasional, menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain atau institusi merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab. Karena dalam praktik kerjasama tersebut, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Proyek pembangunan yang dilakukan oleh Tiongkok mayoritas pada investasi pembangunan yang memiliki peluang besar terhadap pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, untuk mempermudah jalan bagi Tiongkok untuk melancarkan kepentingannya di Zambia, Tiongkok membangun infrastruktur berdasarkan keinginan Zambia untuk menjadi negara yang tidak memiliki ketergantungan dan ingin meningkatkan perekonomian negaranya.

Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya di Zambia, banyak melakukan investasi di berbagai sektor terutama dalam proyek infrastruktur yaitu dalam pembangunan jalan, jembatan, bandaran, dan pelabuhan di Zambia. Investasi Tiongkok tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi Zambia. Akan tetapi dalam investasi Tiongkok, Tiongkok dikritik karena adanya praktik eksploitasi sumber daya alam dan masalah lingkungan (Alden, 2005). Pembangunan yang dijalankan oleh Tiongkok tertuang dalam forum kerjasama dengan negara-negara Afrika lainnya yaitu FOCAC.

Bentuk Pembangunan Internasional Tiongkok di Zambia jelas terlihat pada masa pemerintahan Hu Jintao yang meresmikan Zona Ekonomi

dan Perdagangan Afrika. Negara Zambia juga memiliki Zona Ekonomi dan Perdagangan Eksklusif yang dibangun oleh Tiongkok yaitu dibangunnya pabrik peleburan tembaga Chambisi yang dikendalikan oleh Tiongkok di Zambia. Tiongkok memonopoli perdagangan Tembaga bekerjasama dengan *Non-Ferrous Tiongkok (CNMC)* dan industri Tembaga Yunnan (*YNCIG*). *White elephant project* merupakan istilah dari mega proyek pembangunan Tiongkok.

Salah satu mega proyek Tiongkok yang termasuk dalam *White Elephant Project* Tiongkok yaitu pembangunan Transportasi kereta api yang menghubungkan Zambia dengan negara Tanzania. Hal tersebut memiliki keuntungan bagi Tiongkok untuk memperluas perdagangannya dan memberikan kemudahan dalam mobilisasi arus perdagangan lintas negara.

2.2. Sejarah Hubungan Tiongkok-Zambia

Afrika berperan penting dalam kebijakan luar negeri Tiongkok sejak berakhirnya perang saudara Tiongkok pada tahun 1947. Tiongkok mendukung beberapa gerakan pembebasan Afrika selama Perang Dingin, dan setiap tahun sejak tahun 1950, kecuali satu, menteri luar negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRC) pertama kali mengunjungi negara Afrika. Menteri luar negeri Tiongkok yang baru, Qin Gang, mengunjungi lima negara Afrika dan Uni Afrika pada Januari 2023. Wang Yi, mantan menteri luar negeri, mengunjungi 48 negara Afrika dan Perdana Menteri Xi

Jinping melakukan 10 kunjungan ke Afrika antara tahun 2014 dan 2020 (Rapanyane, 2020).

Pada tahun 1971, suara negara-negara Afrika berperan penting dalam memenangkan kendali RRT atas kursi Tiongkok di Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mengusur perwakilan dari kekuatan nasionalis Tiongkok, yang telah dikalahkan dalam perang saudara dan kini memerintah Taiwan. Dalam beberapa dekade berikutnya, fokus Tiongkok di Afrika beralih untuk menghilangkan semua pengakuan yang tersisa terhadap pemerintah Taiwan. Burkina Faso, Malawi, Liberia, Senegal, dan lainnya semuanya mengalihkan pengakuan mereka dari Taiwan ke RRT. Eswatini adalah satu-satunya negara Afrika yang masih mengakui pemerintah Taiwan pada tahun 2023 (Chen, Raga, Calabrese, & Mustapha, 2023).

Sejak tahun 1960-an hingga 1970-an Tiongkok dan Zambia memiliki sejarah komprehensif perihal neo-kolonialisme selama proses awal pascakolonial Zambia, Tiongkok menganggap dirinya sebagai sekutu melalui kerja sama dan bantuan selatan-selatan. Setelah SAP destruktif yang diterapkan oleh IFI pada tahun 1980-an dan 1990-an, hubungan Tiongkok-Zambia berkembang ketika Tiongkok memanfaatkan fleksigemoni neo-kolonial untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan keinginan Zambia untuk melakukan pembangunan melalui infrastruktur perkotaan supaya dapat memenuhi agenda perekonomian Zambia (Ernske, 2020). Pada tahun 1999 Tiongkok menciptakan strategi '*Going Out*', yang mendorong

perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di luar Tiongkok. Strategi tersebut merupakan pernyataan kekuatan ekonomi Tiongkok yang semakin meningkat dan menciptakan gelombang baru keterlibatan Tiongkok di Afrika (Mwanawina, 2008).

Pada bulan November 2003, Konferensi tingkat tinggi *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC) digelar tiga tahunan serta digelar pertama kali di Beijing. FOCAC dibentuk untuk meningkatkan kerja sama antara Tiongkok dan negara-negara Afrika dan menandakan inisiatif strategis Tiongkok yang semakin berkembang di Afrika (King, 2020). Melalui FOCAC, Tiongkok memperluas kerjasamanya dengan negara-negara Afrika. Motif utama Tiongkok dalam menguatkan hubungannya dengan negara-negara Afrika dalam hubungan bisnisnya karena kebutuhan untuk mendapatkan sumber energi yang sangat mendesak dan untuk mendukung perkembangan sektor industri Tiongkok sebagai pesaing di pasar global menyaingi Amerika Serikat. Tiongkok berfokus pada Afrika lewat kerjasama ekonomi yang bermula dalam KTT Tiongkok-Afrika yang menghasilkan FOCAC. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama investasi dan perdagangan antara Tiongkok dan Afrika. Hingga saat ini, terdapat sekitar 49 negara di Afrika yang menjadi anggota FOCAC dimana kegiatan perdagangan bebas terbuka bagi Tiongkok dan negara-negara Afrika (Waluyo, 2017).

Tiongkok memandang kehadiran FOCAC tidak hanya sebagai peluang kerjasama ekonomi dengan negara-negara Afrika. Selain itu,

FOCAC penting bagi Tiongkok untuk dijadikan salah satu kebijakan luar negeri Tiongkok di kawasan Afrika. Oleh karena itu, Tiongkok menjadi negara yang memperhatikan tindakan agresif untuk mempromosikan FOCAC ke negara-negara internasional. Tiongkok memperluas pengaruhnya di Afrika karena Tiongkok memandang Afrika sebagai kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang berlimpah dan memiliki masa depan yang cerah bagi para investor dan pelaku usaha berbagai negara untuk berinvestasi. Secara sederhana *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC) merupakan salah satu poin penting bagi kebijakan perdagangan Tiongkok. FOCAC dijadikan sebuah sarana dengan prioritas tinggi untuk mendorong perbaikan ekonomi melalui investasi dan perdagangan antara Tiongkok dan Afrika. Dalam sisi politik, Tiongkok memandang Afrika sebagai *bargaining position* Tiongkok di dunia internasional (Waluyo, 2017).

Pada tahun 2013, *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok diluncurkan oleh Xi Jinping, yang menampilkan ambisi untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan sutra lama di sepanjang pantai Afrika Timur. Secara teori, hal tersebut seharusnya membuat investasi Tiongkok terkonsentrasi di Afrika Timur, namun banyak negara Afrika lainnya juga mencari peluang melalui BRI, sehingga inisiatif ini dengan cepat memperluas cakupan dan ambisinya di Afrika. BRI melihat sejumlah besar proyek infrastruktur unggulan dibangun di Asia dan Afrika, didanai oleh pinjaman Tiongkok yang ukuran sifat dan asal usulnya seringkali tidak

jelas. Beberapa negara Afrika menjadi sangat terekspos terhadap pinjaman Tiongkok selama periode tersebut (Rivai, 2023).

Investasi Tiongkok mencapai puncaknya pada tahun 2016. Sejak itu, pinjaman Tiongkok kepada pemerintah-pemerintah di negara Afrika menurun secara signifikan, turun dari \$28,4 miliar pada tahun 2016 menjadi \$1,9 miliar pada tahun 2020, sebagian besar disebabkan oleh perubahan prioritas dalam politik dalam negeri Tiongkok, dan sebagian lagi karena kesulitan yang dihadapi negara-negara Afrika dalam membayar pinjaman utangnya (Moses & Hwang, 2020).

Kesuksesan ekonomi Tiongkok yang berkelanjutan membuat Tiongkok memanfaatkan kemakmuran ekonominya untuk mendorong agenda kebijakan luar negeri yang memberikan pinjaman besar-besaran untuk mendanai proyek infrastruktur perkotaan yang menjanjikan. Selain itu, kemunculan *One Belt One Road* yang diinisiasi oleh Tiongkok menjadi kebermanfaatannya bagi negara-negara terbelakang karena mereka tidak mampu untuk membangun infrastruktur negara mereka karena terhalang oleh dana. Oleh karena itu, Tiongkok memperluas kebijakan luar negeri ekonominya ke negara Afrika karena menurut Tiongkok, negara-negara Afrika masih memerlukan bantuan secara finansial. Tiongkok mendanai banyak gerakan dekolonisasi di seluruh benua dengan memberikan bantuan dan juga senjata. Keterlibatan ekonomi Tiongkok di benua Afrika dapat digambarkan dengan memanfaatkan proses Fleksigemoni. Fleksigemoni adalah metode neo-kolonial dimana pemerintah Tiongkok

mengkontekstualisasikan sejarah, politik, dan sejarah tertentu seperti sejarah geografis negara-negara Afrika yang ingin dilibatkan, dan mengadaptasi, serta mengubahnya (Ernske, 2020).

2.2.1. Dinamika Hubungan Zambia Tiongkok

Sejarah hubungan Tiongkok dan Zambia dimulai pada masa awal kemerdekaan politik Zambia dari Britania Raya (UK) pada bulan Oktober 1964. Pada masa itu, Zambia masih disebut Rhodesia Utara. Tiongkok salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Zambia dan mendukung emansipasi politik Zambia pada masa kolonial dalam bentuk finansial dan material. Qiang (2007) berpendapat keterlibatan Tiongkok dengan Zambia dibagi menjadi tiga fase: fase pertama adalah dari tahun 1949 hingga 1979, fase kedua adalah dari tahun 1979 hingga 1999, dan fase terakhir adalah dari tahun 1999 hingga saat ini (Rapanyane, 2020).

Dalam membangun stabilitas negara, Zambia berfokus pada perolehan politik dari penjajah yaitu Britania Raya dan peningkatan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Setelah Zambia merdeka pada tahun 1964, Tiongkok mulai memberikan bantuan kepada Zambia dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Zambia dalam meningkatkan perekonomian negara nya pertama kali, pemerintah Zambia membangun jaringan transportasi dan memberikan dukungan kebebasan politik di wilayah komunitas pembangunan Afrika Selatan (SADC). Hal tersebut dilakukan oleh Zambia karena pada masa itu Zambia masih berada dibawah kendali penuh rezim apartheid Afrika Selatan. Setelah tahun 2000,

hubungan luar negeri Zambia berangsur membaik terutama sejak FOCAC sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang mendorong hubungan Tiongkok dengan Zambia (Rapanyane, 2020).

Kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Zambia memiliki fokus utama pada konteks pilar dan/atau prinsip-prinsip terpadu dalam *white paper* Tiongkok di Afrika pada tahun 2006 yang didalamnya terdapat prinsip dukungan timbal balik, kesejahteraan korelatif, persahabatan dan keadilan, kepercayaan, *trade-off*, kebiasaan yang terus-menerus, pengaruh dan subsistensi interaktif sebagai pilar kebijakan Tiongkok di Afrika. Dalam dinamika hubungan Tiongkok dengan Zambia, Tiongkok memprioritaskan atau memperjuangkan hubungan timbal balik dan integritas, kolaborasi strategis, kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan, dan manfaat interaktif sebagai tanda-tanda kebijakan Tiongkok di Zambia (Rapanyane, 2020).

Saat ini, Zambia dipandang sebagai negara Afrika yang stabil dengan pemilu demokratis yang paling sedikit namun makmur yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Maphoto, 2019). Pada tahun 2018 menurut Indeks Inovasi Global (GII), Zambia merupakan negara stabil secara ekonomi dan politik. GII juga menunjukkan bahwa Zambia berada di peringkat 54 dari 126 negara dalam peringkat negara-negara global dalam hal stabilitas ekonomi dan politik. Zambia menggambarkan kebebasan perdagangan, konvertibilitas mata uang, liberalisasi perdagangan luar negeri secara prinsip, kebebasan penggunaan keuntungan dan juga kebebasan

menentukan harga. Zambia memiliki tanda-tanda peraturan perbankan paling liberal di kawasan SADC oleh karena itu sektor perbankan di negara tersebut berfungsi dengan baik. Zambia memiliki pengawasan perbankan yang bersifat utilitarian dan disertai dengan persyaratan permodalan yang lebih sedikit.

Barang dagangan modal mudah diakses baik oleh modal asing maupun dalam negeri. Di daerah pedesaan, hak kepemilikan tidak didefinisikan secara jelas, namun di daerah perkotaan, hak kepemilikan juga didefinisikan dengan baik. Salah satu contoh adalah lahan pertanian di Barotseland yang masih berada di bawah kewenangan kepemimpinan konstitusional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Zambia memiliki perekonomian yang sangat baik dan memiliki lingkungan yang mudah untuk berbisnis. Hal tersebut menyiratkan bahwa Tiongkok sampai batas tertentu tertarik dengan lingkungan ekonomi Zambia yang stabil dan terbuka (Rapanyane, 2020).

Zambia memiliki peluang yang baik untuk investor dalam pengolahan pertanian dan memajukan investasi dan rantai nilai melalui usaha bisnis bersama. Potensi Zambia di bidang pariwisata sangat bergantung pada kekayaan sumber daya alamnya yang belum tereksplorasi dan masih melayani berbagai kepentingan yang luas, seperti warisan nasional, kegiatan petualangan, budaya yang beragam, pemandangan yang beragam, satwa liar dan hutan belantara. Selain air terjun Victoria, Zambia

memiliki 34 kawasan pengelolaan hewan liar dan 19 taman nasional yang mencakup 22,4 juta hektar lahan (Rapanyane, 2020).

Masalah investasi asing langsung (FDI) di Zambia ditentukan oleh Undang-Undang ZDA tahun 2006, yang beroperasi pada tahun 2007 setelah pelaksanaan dan penggantian Pusat Investasi Zambia (ZIC), Undang-Undang ZDA memperkenalkan iklim investasi liberal untuk memperoleh investasi dan penciptaan lapangan kerja. Undang-Undang ini juga memastikan bahwa peraturan yang lebih ketat dipatuhi terutama ketika menyangkut orang asing dan investor yang memperoleh izin tinggal (Kragelund, 2009).

Salah satu proyek yang didanai oleh Tiongkok yaitu pembangunan kereta api Tanzania-Zambia (TAZARA) pada pertengahan tahun 1970-an yang menempuh jarak 1.860 km. Pada tahun 1970-an hingga 1990-an Tiongkok sendiri mengalami reformasi ekonomi. Periode tersebut merupakan masa reformasi Tiongkok dalam perekonomian Tiongkok yang mengarah ke liberalisme. Hasil dari reformasi ekonomi Tiongkok yaitu masuknya investasi asing ke Afrika termasuk ke negara Zambia. Pada tahun 1990-an hingga saat ini, Tiongkok merupakan negara investor terbesar dibandingkan menjadi pengimpor modal (Hapwaye, Carmody, dan Ramaloko, 2023).

Pada tahun 2006, pasar Tiongkok menyumbang 10% dari ekspor Zambia sebesar USD 381 juta, dibandingkan dengan USD 0,94 juta pada

tahun 1998. Barang ekspor utama Zambia ke Tiongkok yaitu tembaga. Peningkatan ekspor tembaga didorong oleh pembelian tembaga Chambishi oleh China Nonferrous Metals Mining Group pada tahun 1998. BUMN dan perusahaan swasta Tiongkok lainnya juga berinvestasi dalam pertambangan. Tiongkok merupakan negara tujuan utama ekspor Zambia kedua setelah Swiss dan merupakan sumber impor Zambia terbesar kedua setelah Afrika Selatan. Sebagian besar tembaga diperdagangkan melalui Swiss, yang mencakup 60% perdagangan logam global, dan selanjutnya diekspor kembali ke Tiongkok (Hapwaye, Carmody, dan Ramaloko, 2023).

Investasi pertama Tiongkok di Zambia adalah adanya pembangunan *China Mulungshi Textile Factory* di Kabwe pada tahun 1980-an. Pada awalnya perusahaan Tiongkok membangun fasilitas ini sebagai fasilitas yang siap pakai bagi pemerintah Zambia, tetapi pada prosesnya terdapat kendala operasional yang terjadi, perdana menteri Tiongkok menyarankan agar pembangunan tersebut sebagai bentuk kerjasama antara Tiongkok dan Zambia. Pembangunan pabrik ini membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi besar dalam mengurangi angka kemiskinan (McGreal, 2007). Tetapi, proyek tersebut berhenti pada pertengahan tahun 2000-an dikarenakan tidak dapat bersaing dengan wilayah Asia dan sekitarnya (Carmody, 2009).

Zambia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam ekspor, kerjasama, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, sektor manufaktur menjadi sektor yang paling penting dalam pembangunan

ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan investasi. Beberapa investasi Tiongkok dalam bidang manufaktur diantaranya: *Multi-Facility Economic Zone* (MFEZ) di Provinsi Copperbelt, Zambia dengan total modal \$800 juta (Hampwaye G, 2008). Penentuan lokasi MFEZ di Chambishi, Zambia Utara ini karena di wilayah tersebut banyak mengandung sebagian besar cadangan mineral dan wilayahnya dekat dengan *Democratic Republic of Congo* (DRC) (Brautigam, 2009).

2.3. Permasalahan Ekonomi dan Politik Zambia

Zambia merupakan negara pertama di benua Afrika yang gagal memenuhi kewajiban pinjaman internasional selama pandemic Covid-19 dan sejak itu terjadi diskusi ekstensif dengan para kreditor, dengan Tiongkok sebagai negara mitra terbesar. Diskusi tersebut perihal restrukturisasi utang negara Zambia. Komitmen pinjaman agregat Tiongkok di Zambia menyumbang 43% dari Pendapatan Nasional Bruto (GNI) yang sebagian besar digunakan untuk proyek infrastruktur. Dalam mengelola investasi asing di Zambia, politisi Zambia yang menjalankan kewenangan dalam mengelola investasi asing dan banyak perusahaan serta kreditor Tiongkok yang tidak terkoordinasi ikut dalam upaya mereka dalam mencapai tujuan restrukturisasi utang negara Zambia, dana yang telah membuat Zambia berada dalam kondisi kebangkrutan (Hapwaye, Carmody, dan Ramaloko, 2023).

Seiring dengan semakin banyaknya BUMN dan perusahaan Tiongkok yang mulai beroperasi di Zambia, keterlibatan lainnya juga semakin mendalam karena banyaknya bank yang mulai menawarkan pinjaman kepada lembaga pemerintah Zambia. Sejak tahun 2002, pinjaman Tiongkok telah terdiversifikasi dengan semakin banyak lembaga pemberi pinjaman swasta yang memberikan pinjaman kepada lembaga pemerintah dan kementerian (Hapwaye, Carmody, dan Ramaloko, 2023).

Dampak dari pembangunan internasional dalam fenomena kerjasama ekonomi antara Zambia dengan Tiongkok, mempengaruhi politik dan ekonomi Zambia terhadap Tiongkok dan menjadi permasalahan politik dan ekonomi Zambia karena dengan begitu, Tiongkok semakin memperluas eksplorasi sumber daya Zambia untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut jelas terlihat dimana Tiongkok mendapatkan setengah saham pertambangan tembaga milik Zambia yang pada awalnya, Tiongkok hanya ingin membantu Zambia untuk mengelola hasil tambang yang Zambia miliki. Permasalahan investasi yang dilakukan oleh Tiongkok di setiap bidang pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Zambia juga menjadi pemicu konflik internal di ranah perpolitikan Zambia. Adanya penilaian dan pengaruh politisi lokal untuk menentukan bagaimana investasi berbasis pinjaman mengubah politik lokal (Ernske, 2020).

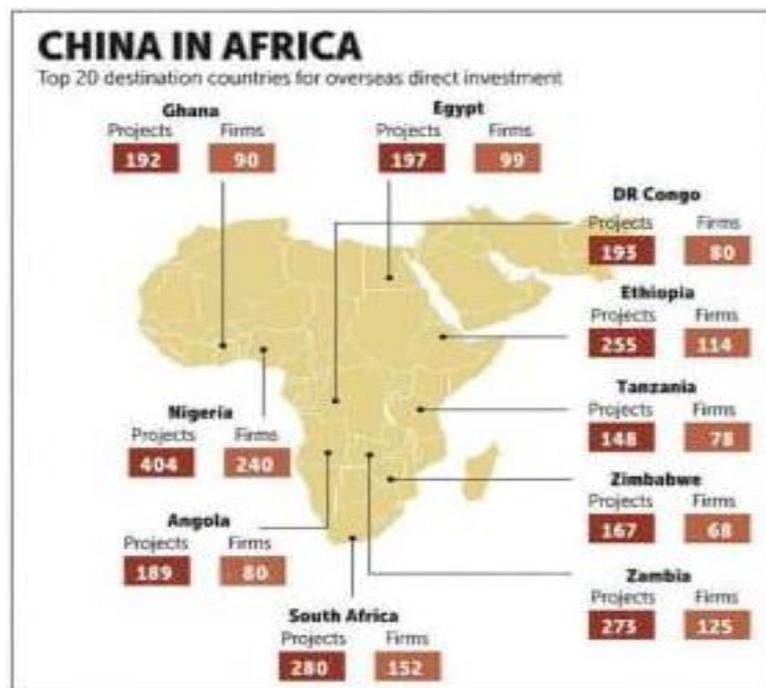
2.4. Investasi Tiongkok di Afrika

Tiongkok telah mengambil posisi yang bertentangan dengan pemerintah Barat dalam investasinya di Afrika. Negara ini mencirikan pinjamannya sebagai kerja sama yang saling menguntungkan antara negara-negara berkembang, dan berjanji untuk tidak ikut campur dalam politik internal negara-negara yang menerima pinjaman. Dalam hal ini, berbeda dengan negara-negara Barat, yang dianggap oleh Tiongkok dan beberapa negara di Afrika memiliki sikap arogan dan demokratis – seringkali oleh negara-negara bekas kolonial yang menjarah sumber daya alam di Afrika pada abad ke-18 dan ke-19 (Mushota, 2021).

Tiongkok telah belajar sambil melakukan, dan realitas investasi skala besar mengajarkan para investor Tiongkok batasan pendekatan mereka (Alunaza, 2021). Misalnya, selama perang saudara di Sudan Selatan, Tiongkok harus berurusan dengan perwakilan dari berbagai kekuatan yang menentang pemerintah untuk mempertahankan Jalur Pipa Minyak Nil Besar, yang dioperasikan oleh *China National Petroleum Corporation* (Xu, 2017). Tiongkok belum berupaya secara signifikan untuk melakukan ekspor ideologi komunisnya di Afrika sejak Perang Dingin berakhir, dan mengklaim bahwa paham komunisme modern dari Tiongkok tidak dapat ditiru di luar Tiongkok. Namun, ada hubungan ideologis antara Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan para penguasa negara seperti Ethiopia, yang Partai Kemakmurannya berasal dari ‘demokrasi revolusioner’ dan Marxis-Leninisme (Nantulya, 2022).

Kongres Rakyat Nasional Tiongkok memiliki hubungan formal dengan 35 parlemen Afrika dan *International Liaison Department* (ILD). PKT memiliki hubungan dengan 110 partai politik di 51 negara Afrika. Politisi Barat semakin menyuarakan kekhawatirannya bahwa niat Tiongkok di Afrika itu bersifat predator, dengan maksud untuk menciptakan jaringan negara-negara Afrika yang wajib membayar hutang mereka dengan menawarkan akses terhadap sumber daya, peluang perdagangan, dan lokasi pangkalan militer kepada Tiongkok (Arisanto & Maturbongs, 2023).

Gambar 2.1 Peta Geografis Investasi Tiongkok di Negara-Negara Afrika



Sumber : (EY Attractiveness Programme Africa, 2017)

Investasi Tiongkok di Afrika pada tahun 2016 tersebar di beberapa proyek strategis di masing-masing negara yang ada di Afrika. Proyek yang

paling banyak dilakukan oleh Tiongkok berada di negara Afrika Selatan yang memiliki sumber daya yang melimpah pada pertambangan. Kemudian di Zambia yang memiliki banyak proyek pertambangan dan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan jalur ekonomi Zambia dan merealisasikan *One Belt One Road* Tiongkok di kawasan Afrika (Mushota, 2021).

Investasi Tiongkok di benua Afrika telah meningkat sejak tahun 2003, pada tahun 2021, investasi asing langsung (FDI) Tiongkok di Afrika mencapai sekitar 23% dari arus masuk investasi asing tahunan di kawasan tersebut atau senilai US\$ 3 miliar (IMF, 2023). Investasi Tiongkok di Afrika ini banyak membantu secara finansial, salah satu contoh proyek investasi unggulan Tiongkok adalah di negara Kenya yaitu *Standard Gauge Railway* (SGR). *Standard Gauge Railway* sendiri menghubungkan kota Mombasa yaitu kota pelabuhan terbesar yang ada di Kenya, dengan ibu kota negara Kenya yaitu Nairobi. Kemudian hingga tahun 2022, lebih dari 10.000 perusahaan Tiongkok beroperasi di Afrika dengan nilai lebih dari US\$ 2 Triliun (House Foreign Affairs Committee GOP, 2022).

Investasi Tiongkok di Afrika menjadi topik menarik perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Cara-cara yang dilakukan merupakan bagian dari strategi ekonomi Tiongkok dengan tujuan untuk memperluas pengaruhnya secara global dan mendapatkan akses ke sumber daya alam yang berlimpah di Afrika. Tiongkok mengalokasikan miliaran dollar untuk proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan

pelabuhan di berbagai negara di benua afrika. Sumber daya alam menjadi salah satu daya tarik utama bagi Tiongkok dalam berinvestasi di Afrika. Negara-negara Afrika kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, batubara, dan logam mulia lainnya, yang sangat dibutuhkan oleh Tiongkok untuk mendukung pertumbuhan ekonominya yang cepat. Investasi Tiongkok di sektor pertambangan di Afrika, khususnya di negara-negara seperti Zambia, Kongo, dan Angola, memunculkan kritik terkait dengan praktik eksploitasi sumber daya alam dan masalah lingkungan (Alden, 2005).

Selama periode 1967-2006, pinjaman Tiongkok berjumlah USD409,4 juta dan selain itu terdapat hibah sebesar USD 5,4 juta. Hibah dibatasi pada penyediaan bantuan makanan, peralatan, dan barang-barang umum. Zambia menerima bantuan dari Tiongkok ketika negara Zambia benar-benar putus asa dan membutuhkan dana. Proyek jalan menuju Kaoma dan antara Serenje dan Mansa antara tahun 1970-an dan 1980-an merupakan salah satu contoh kerjasama pembangunan dengan Tiongkok (Hapwaye, Carmody, dan Ramaloko, 2023).

Pada forum perdagangan dan investasi Zambia-Tiongkok yang diadakan baru-baru ini di Lusaka, Presiden Zambia, Hakainde Hichilema, menekankan pentingnya investor Tiongkok dalam pengembangan industri yang menambah nilai. Zambia mengekspor bahan mentah berupa mineral, kayu, dan hasil pertanian. Ekspor Zambia ke Tiongkok pada tahun 2021 diperkirakan mencapai US\$1,2 miliar dibandingkan impor senilai US\$896

juta pada periode yang sama. Oleh karena itu, Zambia memerlukan kemitraan baru dengan Tiongkok berdasarkan peningkatan ekspor barang-barang bernilai tambah (Hapwaye, Carmody, dan Ramaloko, 2023).

Tiongkok memiliki struktur kekuasaan yang terorganisir di dalam negara nya dalam aktivitas investasi. Menurut Shi dan Li, di Zambia, piramida kekuasaan ada di dalam asosiasi-asosiasi Tiongkok yang bermula dari kedutaan Tiongkok di tingkat atas, hingga asosiasi-asosiasi dan individu-individu Tiongkok serta perusahaan-perusahaan (Hapwaye, Carmody, dan Ramaloko, 2023). Tiongkok melakukan investasi di Afrika lebih besar di pertambangan. Investasi pertambangan Tiongkok salah satu nya minyak. Ketergantungan minyak mentah Afrika dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan penduduk Tiongkok berkembang pesat, membuat Tiongkok ketergantungan minyak Afrika dan meminimalkan ketergantungan minyak Timur Tengah. Tiongkok telah berinvestasi di Sudan, Chad, Nigeria, Angola, Aljazair, Gabon, Guinea Ekuatorial, dan Republik Kongo (Ayenagbo, Rongcheng, Xueting, Lawani, Njobvu, & Bessan, 2011).

Nigeria merupakan eksportir minyak mentah terbesar bagi Tiongkok. Oleh karena itu *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) telah membayar US\$2,7 miliar untuk hak eksplorasi minyak. Tiongkok memiliki 45% saham yang diperkirakan memproduksi 225.000 b/d pada akhir tahun 2008. Proyek *Greater Plutonic* yang dioperasikan oleh *BP China Petroleum and Chemical Corporation* (SINOPEC) memiliki 50%

saham yang memproduksi lebih kurang 200.000 barel per hari pada tahun 2007. Di Angola, *China Petrochemical Corporation* (SINOPEC) memperoleh 50% saham di proyek *Greater Plutonic* yang dioperasikan oleh BP. Di Sudan, *China National Petroleum Corporation* (CNPC) membantu mengembangkan ladang minyak Sudan, Tiongkok menerima 60% produksi minyak Sudan karena membantu mengembangkan ladang minyak milik Sudan. Di Somalia, CNOOC telah menandatangani kesepakatan pembagian produksi dengan pemerintah transnasional Somalia. Afrika salah satu wilayah yang menjanjikan untuk produksi minyak di masa depan, di Ghana eksplorasi minyak sedang berlangsung (Ayenagbo, Rongcheng, Xueting, Lawani, Njobvu, & Bessan, 2011).

Dalam sumber daya mineral Tiongkok memperluas pengaruhnya dengan meresmikan Zona Ekonomi dan Perdagangan Afrika oleh Presiden Hu Jintao pada saat kunjungannya ke Afrika tahun 2007 hal tersebut menjadi bukti bahwa Tiongkok memonopoli perdagangan mineral di Afrika. Pabrik peleburan Tembaga Chambisi yang dikendalikan oleh Tiongkok di Zambia berada di jantung zona ekonomi ini dan merupakan perusahaan patungan antara penambangan Logam *NonFerrous* Tiongkok (CNMC) dan industri Tembaga Yunnan (YNCIG). Tiongkok mengklaim bahwa sumber daya mineral yang sangat besar di negara tetangganya, Zimbabwe yang dimana Presiden Robert Mugabe dibenci oleh negara-negara barat dengan mengeluarkan “kebijakan melihat ke timur” yang terinspirasi dari Tiongkok. Di Angola, Tiongkok mengalahkan tawaran

Brazil pada tahun 2005 dalam hal pemanfaatan cadangan bijih besi. Di Republik Demokratik Kongo, Tiongkok mencapai kesepakatan pada tahun 2006 dengan nilai US\$8 miliar dolar yang memberi Tiongkok 68% saham di Grecamines.

Tiongkok juga berinvestasi dalam pendidikan di Afrika dengan memberikan sekitar 1.200 beasiswa pemerintah Tiongkok kepada pelajar Afrika setiap tahunnya. Tiongkok telah mendirikan enam institut konfusius nirlaba di enam negara Afrika untuk mengajarkan bahasa dan budaya Tiongkok. Dalam melatih bakat sains dan teknologi, Tiongkok telah mengirimkan guru profesional ke 35 negara Afrika untuk membantu mereka mengembangkan pendidikan sekolah tinggi dan menengah.

Dalam sisi pariwisata, adanya libur nasional selama tujuh hari di Tiongkok yang berlangsung pada awal bulan Oktober hingga 7 Oktober membuat wisatawan Tiongkok banyak mengunjungi Afrika. Karena lonjakan wisatawan yang masuk ke Afrika cukup besar dari Tiongkok, pemerintah dan operator tur sedang mencari cara untuk menembus pasar pariwisata Tiongkok yang sedang berkembang. Wisatawan Tiongkok banyak mengunjungi negara Kenya, Zimbabwe, Angola, dan sejumlah negara Afrika yang mengalami tren peningkatan selama empat tahun terakhir terutama setelah Tiongkok memberikan negara-negara Afrika status tujuan yang disetujui oleh kelompok wisatawan Tiongkok pada tahun 2004.

Selain di bidang pariwisata, Tiongkok juga bersumbangsih dalam bidang pertanian negara-negara Afrika. Banyak pejabat dan petani Tiongkok berinvestasi di Afrika ketika mereka mempertimbangkan cara untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan dan masuknya WTO. Mulai tahun 1960-an, Tiongkok memprakarsai sejumlah besar proyek pertanian kooperatif di Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Togo, dan Uganda. Sebagian besar merupakan proyek bantuan, namun kerjasama pertanian terus berlanjut hingga saat ini (Ayenagbo, Rongcheng, Xueting, Lawani, Njobvu, & Bessan, 2011).

Tiongkok menyadari bahwa pentingnya menjalin hubungan baik dengan Afrika karena Tiongkok kebijakan luar negeri *one China policy*. Pengeluaran kebijakan satu China tersebut dikarenakan pemisahan Taiwan dari kedaulatan Tiongkok. Oleh karena itu, ketika permasalahan Taiwan tersebut bermula di politik internasional, Tiongkok mengikat negara mitranya untuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Semua negara Afrika selain Swaziland telah berjanji setia kepada Tiongkok. Pada tahun 2018, Burkina Faso menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok, meninggalkan Swaziland yang tidak mengakui *One China Policy*. Rencana lima tahun (FYP) Tiongkok yang diperkenalkan pada tahun 2021 berfokus pada kemandirian, ketergantungan, pembangunan pertanian, dan teknologi lingkungan (Mushota, 2021).

Rencana lima tahun yang ke-14 ini menggambarkan visi Tiongkok untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang akan memandu kebijakan Tiongkok dari tahun 2021 hingga 2025. Agenda rencana lima tahun ini menekankan pada reformasi sistem pasar, pengembangan ekonomi kepemilikan negara, dan mencakup strategi sirkulasi ganda. Strategi sirkulasi ganda bertujuan untuk memperluas permintaan domestik Tiongkok dan mengembangkan ekspor pasar pada saat yang bersamaan. Dalam memanfaatkan DCS ini, Tiongkok bermaksud untuk mengurangi eksposurnya terhadap kondisi pasar eksternal. Fokus FYP ke-14 ini yaitu memajukan perekonomiannya dengan merevitalisasi produktivitas dalam memimpin pertumbuhan ekonomi (Mushota, 2021).